

**PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP
KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Yulianus Sartono

Ch. Heni Kurniawan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43 – 44, Yogyakarta

ABSTRACT

Penelitian tentang pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai Barat bertujuan untuk membuktikan pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada Kabupaten yang lahir pada era otonomi daerah khususnya Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan Kabupaten Pemekaran yang dibentuk tahun 2003.

Pengambilan sampel dilakukan secara nonprobabilitas yang dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014 sedangkan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut adalah menggunakan kriteria telah menduduki jabatan struktural tertentu minimal selama 2 (dua) tahun. Adapun data dalam penelitian ini merupakan data opini individu. Untuk mendapatkan data opini individu menggunakan teknik survei. Survei (*survey*) atau lengkapnya *self-administered survey* adalah metode pengambilan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 134 orang.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelima karakteristik tujuan anggaran yakni Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran mampu secara bersama-sama mempengaruhi kinerja sebesar 38 %. Namun jika diuji secara parsial variabel Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja sedangkan evaluasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat.

Kata Kunci : *Satuan Kerja Perangkat Daerah, Karakteristik Tujuan Anggaran, Kinerja*

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik setiap tahun melakukan penyusunan anggaran. Anggaran dalam organisasi sektor publik merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter (Mahsun dkk.2011 :75). Anggaran bagi sebuah organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah memiliki peran yang sangat

penting. Pentingnya anggaran bagi organisasi sektor publik karena beberapa alasan yakni *pertama* anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. *Kedua* anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. *Ketiga* anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang ada (Syarifuddin, 2003).

Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun anggaran dalam bentuk program kegiatan untuk pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran untuk Pemerintah Daerah dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rahayu (2007) dalam Istiyani (2009) menguraikan bahwa sebelum disahkan sebagai sebuah APBD, anggaran pemerintahan daerah terlebih dahulu melewati beberapa proses penyusunan yang relatif rumit. Berbeda dengan sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan.

Dalam pelaksanaannya, sebagai bagian dari pemenuhan amanat Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri setiap tahun harus mengeluarkan Pedoman Penyusunan APBD. Sebagai contoh untuk pedoman penyusunan APBD tahun 2014 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Dalam Permendagri ini antara lain disebutkan bahwa penyusunan APBD memiliki prinsip yang perlu dipatuhi oleh Pemerintah Daerah yakni sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya; tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; memperhatikan

asas keadilan dan kepatutan; dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Proses-proses tersebut di atas menuntut Aparatur Pemerintah Daerah untuk memiliki kapasitas mumpuni dalam penyusunan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban APBD. Menurut Kenis (1979) dalam Kholmi dan Milayanti (2012) pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif apabila penyusunan anggaran dan penerapannya memperhatikan lima komponen *budgetary goal characteristics* (karakteristik tujuan anggaran) yaitu: partisipasi anggaran (*budgeting participation*), kejelasan tujuan anggaran (*budget goal clarity*), evaluasi anggaran (*budgeting evaluation*), umpan balik anggaran (*budgeting feedback*), dan kesulitan tujuan anggaran (*budgeting goal difficulty*).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat?
2. Apakah kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat?
3. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat?
4. Apakah umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat?
5. Apakah kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat?
6. Apakah karakteristik tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membuktikan pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada Kabupaten yang lahir pada era otonomi daerah khususnya Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan Kabupaten Pemekaran yang dibentuk tahun 2003.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk regulasi yang mengamanatkan pentingnya setiap SKPD memahami karakteristik tujuan anggaran sebelum penyusunan APBD setiap tahunnya.

E. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Partisipasi anggaran merupakan sarana bagi karyawan untuk dapat lebih mengerti terhadap apa yang mereka kerjakan (Syafrial, 2009). Mediaty (2010) menguraikan bahwa Partisipasi anggaran juga merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Penelitian Syafrial dan Istiyani membuktikan hal tersebut. Penelitian Syafrial (2009) membuktikan bahwa Partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah di Kabupaten Sorolangun. Demikian pula penelitian Istiyani (2009) yang menyatakan bahwa Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah di Kabupaten Temanggung.

H1:Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Syafrial (2009) menguraikan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja. Berdasarkan hal ini, Syafrial (2009) melakukan penelitian dan menyatakan bahwa berdasarkan uji parsial kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja. Hal yang sama terbukti dalam penelitian Istiyani (2009) yang menjelaskan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja.

H2 :Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja perlu diukur atau dinilai untuk mengetahui sejauh mana hal tersebut tercapai. Istiyani (2009) menguraikan bahwa penilaian kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang telah melaksanakan pekerjaan masing-masing secara keseluruhan atau suatu proses yang terjadi di dalam organisasi untuk menilai atau mengetahui kinerja seseorang. Dalam penganggaran berbasis kinerja, evaluasi anggaran dilakukan dengan melihat input dan output yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Kholmi dan Milayanti (2012) menunjukkan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap sikap aparat dalam menilai kinerja pemda Kota Palangka Raya. Hasil analisis kualitatif penelitian Munawar dkk.(2006) juga menunjukkan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja.

H3 :Evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah.

4. Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Rasuli dan Lukum (2012) menyatakan bahwa umpan balik terhadap sasaran anggaran yang dicapai adalah variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer. Penelitian Istiyani (2009) menunjukkan bahwa umpan balik anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemda Kabupaten Temanggung. Penelitian Munawar dkk.(2006) juga menunjukkan bahwa umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja.

H4 : Umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah.

5. Pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Istiyani menguraikan bahwa tujuan yang sulit menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan jika menetapkan tujuan spesifik yang sedang atau mudah, maupun tujuan yang bersifat umum. Tujuan yang mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki sedikit pengaruh motivasi. Tujuan yang sangat ketat dan tidak dapat dicapai, mengarahkan pada perasaan gagal, frustrasi, dan tingkat aspirasi yang

rendah. Hasil penelitian Istiyani (2009) menunjukkan bahwa kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah di Kabupaten Temanggung.

H5 : Kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah.

6. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kenis (1979) menguraikan bahwa sebagian besar pengaruh positif dan negatif dari anggaran terhadap sikap, perilaku dan kinerja para manajer tingkat yang lebih rendah dapat ditelusuri ke gaya penganggaran manajemen tingkat atas. Konsep tentang gaya penganggaran ini meliputi karakteristik tujuan anggaran yaitu Partisipasi anggaran (*budgeting participation*), kejelasan tujuan anggaran (*budget goal clarity*), evaluasi anggaran (*budgeting evaluation*), umpan balik anggaran (*budgeting feedback*), dan kesulitan tujuan anggaran (*budgeting goal difficulty*). Penelitian Istiyani (2009) menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat Pemda Kabupaten Temanggung.

H6 : Karakteristik tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Obyek, Populasi, Dan Sampel Penelitian

Obyek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Adapun populasinya adalah Aparat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan sampelnya adalah Para Kepala SKPD, Sekretaris pada SKPD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.

2. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara nonprobabilitas yang dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah para

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014. Sedangkan yang tidak termasuk dalam Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan kriteria telah menduduki jabatan struktural tertentu minimal selama 2 (dua) tahun.

3. Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan data opini individu. Jogiyo (2007 :138) menguraikan bahwa untuk mendapatkan data opini individu menggunakan teknik survei.

G. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

a. Partisipasi Anggaran

Variabel partisipasi anggaran menunjukkan nilai rata-rata hitung sebesar 2,296, berdasarkan pembagian kelas interval maka nilai rata-rata hitung 2,296 termasuk dalam kategori tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak berjalan baik di Kabupaten Manggarai Barat. Hal lain adalah karena adanya pengaruh yang sangat kuat dari atasan dalam penyusunan anggaran dengan kecenderungan menguasai bawahannya mengakibatkan proses perencanaan *bottom up* tidak berjalan baik.

b. Kejelasan Tujuan Anggaran

Variabel Kejelasan Tujuan Anggaran menunjukkan bahwa nilai rata-rata hitung sebesar 2,5373, berdasarkan pembagian kelas interval maka nilai rata-rata hitung 2,5373 termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam penetapan tujuan anggaran jelas, spesifik dan dapat dimengerti. Penetapan tujuan anggaran yang jelas, spesifik dan dapat dimengerti mencerminkan bahwa aparat pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat memiliki pemahaman akan tujuan daerah dan mampu menterjemahkan hal tersebut dalam anggaran.

c. Evaluasi Anggaran

Variabel evaluasi anggaran menunjukkan nilai rata-rata hitung sebesar 1,87, yang berarti termasuk dalam kategori tidak baik. Hal ini mengindikasikan bahwa evaluasi anggaran tidak berjalan dengan baik di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini meliputi beberapa hal diantara ketidakmampuan atasan dalam menelusuri adanya penyimpangan, rendahnya

tanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi dalam setiap unit kerja, dan ketidakmampuan dalam mengendalikan anggaran.

d. Umpan Balik Anggaran

Analisis deskriptif umpan balik anggaran menunjukkan nilai rata-rata hitung 2,16 yang berarti termasuk kategori tidak baik. Angka ini mengindikasikan umpan balik anggaran tidak berjalan dengan baik di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini berarti di Kabupaten Manggarai Barat umpan balik pada setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak berjalan maksimal; Atau bisa jadi umpan balik yang diberikan tidak memberi nilai tambah dan tidak membantu dalam upaya memperbaiki kinerja.

e. Kesulitan Tujuan Anggaran

Analisis deskriptif kesulitan tujuan anggaran menunjukkan nilai rata-rata hitung 3,0373. Hal ini berarti kesulitan tujuan anggaran tidak menjadi hambatan bagi aparat di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan anggaran yang sulit juga mampu menghasilkan kinerja yang optimal, dan mampu memotivasi aparat pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat untuk bekerja keras mencapai tujuan anggaran yang telah ditetapkan.

f. Kinerja Aparat

Analisis deskriptif variabel dependen tentang kinerja aparat menunjukkan bahwa nilai rata-rata hitung sebesar 2,3867 nilai minimum sebesar 1,55 nilai maksimum sebesar 3,91 dan standar deviasi sebesar 0.40128. Berdasarkan pembagian kelas interval maka nilai rata-rata hitung 2,3867 termasuk dalam kategori baik. Ini mengindikasikan bahwa kinerja aparat pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat baik. Hal ini terjadi karena beberapa hal diantaranya adanya penetapan target anggaran yang terukur dan dapat dicapai, ada evaluasi dalam penetapan target, kerja keras untuk mencapai target, anggaran yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibandingkan dari satu periode ke periode lainnya.

2. PENGUJIAN INSTRUMEN

1. Uji Validitas

Dengan menggunakan alat uji Korelasi *Product Moment* dari Karl Pearson menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam koestioner adalah valid dimana nilai r hitung $> r$ tabel.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurannya. Kuestioner dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha $> 0,6$; dan dari pengujian didapatkan *Cronbach-Alpha Coefficient* dari semua variabel yang ada lebih besar dari 0,6.

3. UJI NORMALITAS

Dengan menggunakan uji statistik yang terdapat dalam uji hipotesis yaitu Kolmogorof Smirnov dapat diketahui apakah distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi keseluruhan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,066 maka dapat disimpulkan bahwa semua data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

4. PENGUJIAN HIPOTESIS

Dengan bantuan SSPS pengujian atas hipotesis menghasilkan persamaan regresi yakni sebagai berikut :

$$Y = 7.282 + 0,382 X_1 + 0,549 X_2 + 0,012 X_3 + 0,303 X_4 + 0,368 X_5,$$

4.1. Uji Nilai t

a. Partisipasi Anggaran

Nilai probabilitas partisipasi adalah 0,000 dengan tingkat signifikansi 10% ($\alpha : 0,1$); $0,000 < 0,1$ maka dapat disimpulkan partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

b. Kejelasan Tujuan Anggaran

Nilai probabilitas kejelasan adalah 0,002 dengan tingkat signifikansi 10% ($\alpha : 0,1$); $0,002 < 0,1$ maka dapat disimpulkan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

c. Evaluasi Anggaran

Nilai probabilitas evaluasi adalah 0,913 dengan tingkat signifikansi 10% ($\alpha : 0,1$); $0,913 > 0,1$ maka dapat disimpulkan evaluasi anggaran tidak signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

d. Umpan Balik Anggaran

Nilai probabilitas umpan balik adalah 0,017 dengan tingkat signifikansi 10% ($\alpha : 0,1$); $0,017 < 0,1$ maka dapat disimpulkan umpan balik anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

e. Kesulitan Tujuan Anggaran

Nilai probabilitas kesulitan adalah 0,001 dengan tingkat signifikansi 10% ($\alpha : 0,1$); $0,001 < 0,1$ maka dapat disimpulkan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

4.2. Uji F

Hasil uji F dilakukan dengan melihat nilai probabilitas yang dibandingkan dengan taraf signifikansi 10% ($\alpha = 0,1$). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,000 < 0,1$ maka dapat disimpulkan karakteristik tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

H. PEMBAHASAN

1) Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat di Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis seperti yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah di kabupaten Manggarai Barat. Hal ini berarti bahwa peningkatan atas partisipasi aparat dalam pembuatan tujuan anggaran akan meningkat kinerja aparat, sebaliknya jika partisipasi aparat dalam pembuatan tujuan anggaran turun maka kinerja aparat Pemda juga akan turun.

Besarnya manfaat partisipasi antara lain diuraikan oleh Rasuli dan Lukum (2012) yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kerja sama yang baik antar departemen.
- b. Mengurangi atau menghilangkan konflik dan ketegangan diantara anggota organisasi.
- c. Meningkatkan kinerja atau prestasi manajer karena manajer atau bawahan memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena merasa ikut terlibat dalam penyusunan.

- d. Menambah pemahaman tentang tugas, tanggungjawab dan strategi yang akan dijalankan karena bawahan diberi kesempatan lebih untuk meminta penjelasan dari atasan.

2) Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat di Kabupaten Manggarai Barat

Syafrial (2009) menguraikan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Produktivitas tersebut akan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Pengujian hipotesis sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa, kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini berarti jika tujuan anggaran jelas, spesifik dan dapat dimengerti maka kinerja aparat pemerintah daerah maka kinerja semakin tinggi, demikianpun sebaliknya jika tujuan anggaran tidak jelas, tidak spesifik dan sulit dipahami maka kinerja akan semakin rendah.

3) Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat di Kabupaten Manggarai Barat

Istiyani (2009) mendefenisikan evaluasi anggaran yaitu sejauh mana selisih anggaran program dan kegiatan SKPD ditelusuri oleh pimpinan ke masing-masing bawahan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. Dengan bahasa lain Kenis (1979) dalam Rasuli dan Lukum (2012) menguraikan bahwa evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja manajemen. Pengujian hipotesis sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa evaluasi anggaran tidak signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat.

4) Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Aparat di Kabupaten Manggarai Barat

Umpan balik anggaran dapat menjelaskan sejauh mana anggota organisasi mengetahui tujuan program dan kegiatan tercapai. Umpan balik dapat juga menjadi bahan bagi organisasi untuk mengetahui hasil yang diperoleh para anggotannya untuk mencapai

sasaran. Umpan balik dapat juga menjadi dorongan bagi anggota organisasi untuk bekerja lebih baik untuk meningkatkan kinerja. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa umpan balik anggaran memberikan pengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi umpan balik yang diterima aparat maka semakin tinggi kinerja aparat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sebaliknya jika umpan balik anggaran sedikit akan melemahkan kinerja aparat. Umpan balik memberi ruang kepada aparat pemda untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif dalam rangka perbaikan kinerja.

5) Pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat di Kabupaten Manggarai Barat

Uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Tujuan anggaran yang sulit mampu mendorong aparat pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat untuk berusaha mencapai hal tersebut dalam rangka menghasilkan kinerja yang optimal. Hal itu juga memberikan motivasi bagi aparat pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat untuk bekerja dengan baik untuk mencapainya. Tujuan yang sulit menurut Hirst dan Lowy (1990) dalam Istiyani (2009) menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan jika menetapkan tujuan spesifik yang sedang atau mudah, maupun tujuan yang bersifat umum. Tujuan yang sulit menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan jika menetapkan tujuan spesifik yang sedang atau mudah, maupun tujuan yang bersifat umum.

6) Karakteristik tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah.

Uji F pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Hasil tersebut selaras dengan apa terori yang dikemukakan oleh Kenis dalam Kholmi dan Milayanti (2012) yang menguraikan bahwa pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif apabila penyusunan anggaran dan penerapannya memperhatikan lima komponen *budgetary goal characteristics* (karakteristik tujuan anggaran) yaitu: partisipasi anggaran (*budgeting participation*), kejelasan tujuan anggaran (*budget goal clarity*), evaluasi anggaran (*budgeting evaluation*), umpan balik anggaran (*budgeting*

feedback), dan kesulitan tujuan anggaran (*budgeting goal difficulty*). Efektif yang dimaksudkan disini adalah dengan memperhatikan karakteristik tujuan anggaran dalam proses dan pelaksanaan anggaran, maka kinerja aparat pemerintah akan meningkat.

I. KESIMPULAN

1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat di Kabupaten Manggarai Barat.
3. Evaluasi Anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat di Kabupaten Manggarai Barat.
4. Umpan Balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat di Kabupaten Manggarai Barat.
5. Kesulitan pencapaian tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat di Kabupaten Manggarai Barat.
6. Karakteristik tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat.
7. Penelitian ini mempertegas apa yang ditemukan oleh Istiyani (2009) yakni bahwa karakteristik tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja namun dengan tingkat prosentase yang berbeda. Jika pada penelitian Istiyani prosentasenya sebesar 62 %, penelitian ini hanya sebesar 38 %.
8. Hasil pengujian secara parsial antara penelitian Istiyani (2009) dengan penelitian ini juga menunjukkan hal yang sama pula dimana partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran memberikan pengaruh positif terhadap kinerja, sedangkan evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja.

J. KETERBATASAN PENELITIAN

Pemilihan waktu dalam penelitian ini tidak tepat, karena situasi psikologis para pejabat struktural di Kabupaten Manggarai Barat tidak menentu. Hal ini terjadi karena pada bulan April dan Mei yang merupakan waktu Peneliti melakukan penelitian merupakan periode dimana pada tahun sebelumnya terjadi pergantian pejabat struktural dari

serangkaian perubahan komposisi jabatan yang terjadi sebanyak enam kali di Kabupaten Manggarai Barat . Kondisi ini relatif mengganggu, sehingga bisa jadi mereka kurang serius dan objektif dalam menjawab pertanyaan yang ada.

K. SARAN

1. Pergantian pejabat struktural di Kabupaten Manggarai Barat hendaknya tidak terlalu sering dilakukan karena akan menghambat upaya peningkatan kinerja.
2. Dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah maka aparat pemda di Kabupaten Manggarai Barat perlu mendapat pendidikan dan pelatihan yang memadai terutama dalam hubungannya dengan peningkatan partisipasi, pemberian umpan balik, penetapan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra.(2006). *Akuntansi sektor publik* (Edisi 3).Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Hartono, J.(2013). *Metodologi penelitian bisnis* (Edisi 6). Yogyakarta, Indonesia : BPF.
- Istiyani. (2009). *Pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemeritah daerah*. Tesis Magister Akuntansi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Kenis, Izzettin. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, Vol.LIV.No.4.
- Kholmi, M., & Milayanti M. (2012).Pengaruh *budgetary goal characteristics* terhadap sikap aparat dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah; studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.*Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, vol 2, 1 : 341-346.
- Munawar, Irianto, G., & Nurkholis. (2006). *Pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap dan kinerja aparat pemeritah daerah di Kabupaten Kupang*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H.E. (2011).*Akuntansi sektor publik* (Edisi 2). Yogyakarta, Indonesia : BPF.
- Modul AIP BPKP Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2011.

- Mediaty.(2010). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparaturn Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. *Majalah Ekonomi*, 3, 299-311.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rasuli, L.O., & Lukum A. (2012) *Pengaruh karakteristik sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial organisasi pada Universitas Negeri Gorontalo*. Laporan hasil penelitian pengembangan program studi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
- Syarifuddin. (2003). *Model-model anggaran pada organisasi sector public dan perkembangannya*. Makalah seminar bulanan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sudrajat.(1998).http://www.gobookee.org/get_book.php?u=aHR0cDovL2FrdW50YW5zaS51bm5lcY5hYy5pZC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMC8wNS9VamktQXN1bXNpLUtsYXNpay1kZW5nYW4tU1BTUy0xNi4wLnBkZgpVamkgQXN1bXNpLEtsYXNpayBkZW5nYW4gU1BTUyAxNg diakses tanggal 14 Oktober 2013.
- Syafril. (2009).*Pengaruh ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun*. Tesis Magister Akuntansi, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.